

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini adalah hasil riset dan penelitian yang pernah dilakukan dalam penelitian pada peneliti sebelumnya. Sehingga hasil penelitian ini akan didapatkan keterkaitan dengan karya ilmiah di atas dan menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun karya ilmiah yang dimaksud adalah sebagai berikut.

**Pertama**, penelitian oleh Oleh Dara Aisyah, Marissa Claudia Pangaribuan yang berjudul “Implementasi kebijakan relokasi pasar tradisional Deli Tua Kabupaten Deli Serdang” pada tahun 2023. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian yang dilakukan lebih memfokuskan pada relokasi pasar Deli Tua untuk melakukan penataan ruang dan Pembangunan pasar dengan konsep modern yang searah dengan Perbup Deli Serdang Nomor 688 tahun 2012, dalam tahap implementasi terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu SDM yang kurang memiliki pengetahuan mengenai relokasi yang dilakukan. Dalam penelitian tersebut menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini yaitu Lokasi yang sebelumnya di daerah Deli Serdang sedangkan penelitian saat ini Kota Batu. Kemudian fokus pembahasan penelitian sebelumnya sebagaimana yang telah dipaparkan di atas sehingga yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan di aspek pokdakan namun lebih memfokuskan untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan pokdakan yang dapat meningkatkan perekonomian di Desa Mojorejo Kota Batu. Adapun yang menjadi kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu pada metode penelitian sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. (Aisyah & Pangaribuan, 2023).

**Kedua**, penelitian oleh Gisela Mburu Amma, Nanang Bagus, Agung Suprojo, yang berjudul “Implementasi Kebijakan BLT di Desa Sidomulyo Kota Batu

Berdasarkan Analisis Van Meter dan Van Horn” pada tahun 2024. Pada penelitian ini menerapkan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian yang dilakukan lebih memfokuskan pada penerapan program Penerapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Sidomulyo dengan temuan bahwa penerapannya sudah terlaksana dengan maksimal akan tetapi terkadang dalam penerapannya mengalami keterlambatan dikarenakan lambatnya transfer dari dinas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn tentang implementasi kebijakan, sehingga ada beberapa faktor dalam implementasi tersebut yang mempengaruhi standar dan tujuan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana. Kemudian fokus pembahasan penelitian sebelumnya sebagaimana yang telah dipaparkan di atas sehingga yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan di aspek pokdakan juga memfokuskan untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan pokdakan yang dapat meningkatkan perekonomian di Desa Mojorejo Kota Batu. Namun adapun kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu wilayah penelitian yaitu Kota Batu dan metode penelitian sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan teori Van Meter dan Van Horn mengenai Implementasi kebijakan. (Ammu, Bagus, & Suprojo, 2024).

**Ketiga**, penelitian oleh Shalma Husnila Putri, Nora Eka Putri yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Terhadap Persetujuan Bangunan Gedung di Sekitar Ruas Jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang” pada tahun 2024. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, penelitian yang dilakukan lebih memfokuskan pada Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 terhadap persetujuan bangunan gedung di sekitar ruas jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Teori yang digunakan yaitu Van Meter dan Van Horn mengenai implementasi kebijakan. Pada implementasi sudah sesuai pada SOP dari kebijakan tersebut, Namun pada pelaksanaan kebijakan terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan yaitu mengenai persetujuan bangunan gedung, terutama dalam hal sasaran kebijakan yang mengalami kurangnya sumber daya manusia dalam pengawasan bangunan, komunikasi yang

kurang organisasi, serta melakukan pertimbangan kondisi sekitar yang meliputi lingkungan sosial dan ekonomi. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini yaitu Lokasi yang sebelumnya di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang sedangkan penelitian saat ini di Desa Mojorejo Kota Batu. Kemudian fokus pembahasan penelitian sebelumnya sebagaimana yang telah dipaparkan di atas sehingga yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan di aspek pokdakan namun lebih memfokuskan terkait untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan pokdakan yang dapat meningkatkan perekonomian di Desa Mojorejo Kota Batu. Namun yang menjadi kesamaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan teori yang digunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. (Shalma & Putri, 2023).

**Keempat**, penelitian oleh Kamilia Nur Afita, yang berjudul “Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Keputran” pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian yang dilakukan lebih memfokuskan untuk menganalisis implementasi kebijakan yang dilakukan terhadap relokasi pedagang yang ada di Pasar Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, namun dalam Implementasi kebijakan terdapat kendala pada sumber daya manusia yang masih tidak menerima dan masih melakukan jual beli di trotoar dan minimnya pengetahuan para pedagang mengenai PERDA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian yang berdampak pada lambatnya terlaksana aturan yang sudah diberikan pemerintah untuk tidak lagi berjualan disepanjang trotoar Pasar Keputran. Kemudian fokus pembahasan penelitian sebelumnya sebagaimana telah dipaparkan di atas sehingga yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan dibagian pokdakan juga namun lebih memfokuskan terkait untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan pokdakan yang dapat meningkatkan perekonomian di Desa Mojorejo Kota Batu. Kemudian yang menjadi kesamaan yaitu pada penggunaan teori Van Meter dan Van Horn dan metode penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan kualitatif. (Afita, 2024)

**Kelima**, penelitian oleh Muh. Nasir, Nuraisyah, Dandan Haryono yang berjudul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Bambaira Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu” Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, penelitian yang dilakukan akan membahas pada implementasi kebijakan yang mendapat kendala pada standar dan sasaran kebijakan yang masih belum tepat sasaran, yaitu pada alokasi dana desa di Desa Bambaira. Hal ini diakibatkan minimnya pendidikan pada sumber daya manusia dalam mendukung fasilitas penggunaannya. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini yaitu pada lokasi yang akan diambil penelitian ini dilakukan pada Desa Bambaira Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu sedangkan penelitian saat ini dilakukan di Desa Mojorejo Kota Batu. Kemudian fokus pembahasan penelitian sebelumnya sebagaimana telah dipaparkan di atas sehingga yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan dibagian kebijakan pokdakan juga namun lebih memfokuskan terkait untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan pokdakan yang dapat meningkatkan perekonomian di Desa Mojorejo Kota Batu. Kemudian yang menjadi kesamaan yaitu pada metode kualitatif dan teori yang digunakan sama -sama Van Meter dan Van Horn.(Muh. Nasir, dkk 2024).

**Keenam**, penelitian oleh Ibnu Kanaha yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara” pada tahun 2024. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini membahas pada implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Pulau Morotai untuk pengembangan sektor wisata. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn yang menyoroti aspek implementasi kebijakan. Pada tahap sumber daya mengalami kendala yaitu pemahaman yang masih kurang dalam menerapkan kebijakan tersebut, sehingga menjadi hambatan dalam implementasi. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini yaitu Lokasi yang sebelumnya di Kabupaten Pulau Morotai sedangkan penelitian saat ini di Desa Mojorejo Kota Batu. Kemudian

fokus pembahasan penelitian sebelumnya sebagaimana telah dipaparkan di atas sehingga yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan dibagian kebijakan pokdakan juga namun lebih memfokuskan terkait untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan pokdakan yang dapat meningkatkan perekonomian di Desa Mojorejo Kota Batu. Kemudian yang menjadi kesamaan yaitu pada metode kualitatif dan teori yang digunakan sama-sama Van Meter dan Van Horn (Kanaha, 2024).

**Ketujuh,** penelitian oleh Wiji Astuti, Indriyati Kamil, yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Pasirlayung)” pada tahun 2024. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif. Fokus utama pada penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung. Teori dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn. Teori ini akan mencakup beberapa aspek dalam implementasi kebijakan. Adapun dalam mengimplementasikan kebijakan terdapat hambatan pada sumber daya manusia, yang masih terbelah masih belum paham mengenai peraturan tentang pengelolaan sampah yang berdampak kurangnya partisipasi dari masyarakat. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini yaitu Lokasi yang sebelumnya di Kota Bandung sedangkan penelitian saat ini di lakukan di Desa Mojorejo Kota Batu. Kemudian fokus pembahasan penelitian sebelumnya sebagaimana telah dipaparkan di atas sehingga yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan dibagian kebijakan pokdakan juga namun lebih memfokuskan terkait untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan pokdakan yang dapat meningkatkan perekonomian di Desa Mojorejo Kota Batu. Kemudian yang menjadi kesamaan yaitu pada teori yang digunakan Van Meter dan Van Horn dan metode kualitatif (Astuti & Kamil, 2024).

**Kedelapan,** penelitian oleh Fajar Diantika, Pandji Santosa, Diani Indah, dengan judul “Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung)” pada tahun 2024. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan

metode kualitatif. Penelitian ini lebih memfokuskan Pada faktor-faktor kendala yang terjadi dalam melakukan implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat khususnya di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, salah satu faktornya adalah masih rendahnya kualitas Sumber daya manusia di desa, untuk itu perlunya perhatian dari Pemerintah Daerah. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini yaitu lokasi yang sebelumnya di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung sedangkan penelitian saat ini di Desa Mojorejo Kota Batu. Kemudian fokus pembahasan penelitian sebelumnya sebagaimana telah dipaparkan di atas sehingga yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan dibagian kebijakan pokdakan juga namun lebih memfokuskan terkait untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan pokdakan yang dapat meningkatkan perekonomian di Desa Mojorejo Kota Batu. Kemudian yang menjadi kesamaan yaitu pada metode kualitatif dan teori yang digunakan sama-sama Van Meter dan Van Horn. (Diani,dkk 2023).

**Kesembilan**, penelitian oleh Sonya Puspitasari, Aminullah, dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan”, pada tahun 2024. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian yang dilakukan akan berfokus untuk mengetahui kendala yang dihadapi pada implementasi kebijakan program blt yang dilaksanakan di Desa Bulukandang. Dengan menggunakan teori implementasi van meter dan van horn yang terdiri dari 6 indikator yaitu standar kebijakan dan sasaran program/tujuan, sumberdaya, komunikasi, karakteristik, lingkungan sosial,ekonomi,politik, sikap/disposisi. Sedangkan yang membedakan yaitu lokasi yang akan diambil, yang sebelumnya di Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan sedangkan penelitian saat ini di Desa Mojorejo Kota Batu. Kemudian fokus pembahasan penelitian sebelumnya sebagaimana telah dipaparkan di atas sehingga yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan di bagian kebijakan pokdakan juga namun lebih memfokuskan terkait untuk

mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan pokdakan yang dapat meningkatkan perekonomian di Desa Mojorejo Kota Batu. Kemudian yang menjadi kesamaan yaitu pada metode kualitatif dan teori yang digunakan sama-sama Van Meter dan Van Horn.. (Puspitasari, dkk 2024).

**Kesepuluh,** penelitian oleh Kresna Sandhi Laksa, dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di UPTD Liponsos Keputih”, pada tahun 2022. Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, pada penelitian ini membahas pada implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan penanganan PMKS. Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn mengenai implementasi kebijakan. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini yaitu lokasi yang sebelumnya di Kota Surabaya sedangkan penelitian saat ini di Desa Mojorejo Kota Batu. Kemudian fokus pembahasan penelitian sebelumnya sebagaimana telah dipaparkan di atas sehingga yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan dibagian kebijakan pokdakan juga namun lebih memfokuskan terkait untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan pokdakan yang dapat meningkatkan perekonomian di Desa Mojorejo Kota Batu. Kemudian yang menjadi kesamaan yaitu pada metode kualitatif dan teori yang digunakan sama-sama Van Meter dan Van Horn (Laksa, 2022).

## **B. Kajian Teori dan Konsep**

### **1. Kebijakan**

Kebijakan diartikan dalam Bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan makna sebagai rangkaian konsep yang menjadi pada dasar rencana dalam sebuah pelaksanaan. Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah dengan cara memberi *rewards dan sanctions* (Salma, 2020). Kebijakan dalam hal ini sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang menjadi sasaran dari kebijakan ini menjadi terpola

sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut, yang melanggar dari kebijakan yang sudah dibuat akan dikenai sanksi dan hukuman.

Secara substansi, kebijakan adalah konsep yang kompleks dan selalu berkembang. Lingkupnya sangat luas, mencakup seluruh permasalahan Masyarakat. Kebijakan bukan hanya soal ekonomi dan politik, melainkan meliputi semua bidang kehidupan sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan budaya. Keluasan ini karena kebijakan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan bersama; membangun masyarakat yang lebih baik memerlukan aturan, strategi, dan program terstruktur.

Kebijakan publik adalah tindakan politik yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang menguntungkan seluruh masyarakat. Sebagai bagian dari perundang-undangan, kebijakan publik harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, proses kebijakan publik mencakup langkah-langkah dalam memilih dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, kebijakan publik juga mencakup proses identifikasi masalah, metode penyelesaiannya, penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan tersebut (Dwi Andyani, 2020).

Kebijakan publik oleh Anggara (2014) dapat dijelaskan sebagai serangkaian keputusan yang saling terkait yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Ini berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan tertentu. Kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil oleh pemegang otoritas publik dan memiliki dampak yang mengikat masyarakat luas.

Menurut Anggara (2014) kebijakan menjadi suatu konsep meliputi beberapa hal berikut ini:

- a. Ketetapan ketentuan-ketentuan yang dapat mempengaruhi dan mengikat pada suatu kebijakan.
- b. Terciptanya suatu kebijakan dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu serta mengatasi masalah yang muncul.
- c. Keputusan yang bisa diambil maupun tidak diambil dalam suatu kepentingan.

- d. Suatu proses pelaksanaan dari hal-hal yang telah ditetapkan.

## **2. Tahapan Kebijakan Publik**

Praktis Dalam membuat sebuah kebijakan, pejabat pemerintah dalam hal ini melakukan rangkaian proses pembuatannya, berikut tahapan mengenai pembuatan kebijakan menurut William N. Dunn dalam Sahya Anggara<sup>6</sup>:

- a. Penyusunan Agenda, pada tahap penyusunan agenda merumuskan masalah yang berkaitan dengan kebijakan yang akan diimplementasikan. Selain itu, tahapan ini juga melibatkan identifikasi asumsi dan masukan guna memahami akar permasalahan, serta mengevaluasi peluang yang terkait dengan kebijakan tersebut.
- b. Formulasi Kebijakan, akan memperkirakan informasi yang sesuai dengan kebijakan, terkait pada permasalahan yang dapat timbul di kemudian hari, dapat mempersiapkan akibat dari kebijakan yang akan diusulkan, serta mengetahui kendala yang akan terjadi.
- c. Adopsi Kebijakan, pada tahap ini informasi yang dihasilkan berkaitan dengan manfaat dan biaya dari penerapan suatu kebijakan, serta melakukan perkiraan terhadap konsekuensi di masa depan. Hal ini membantu dalam persiapan terhadap risiko dan ketidakpastian yang mungkin timbul, serta menetapkan tanggung jawab administratif untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
- d. Implementasi kebijakan, pada tahap ini penting untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan dilaksanakan. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan kebijakan serta dampak yang tidak diinginkan dari kebijakan tersebut
- e. Penilaian kebijakan atau evaluasi, bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai kesesuaian antara kebijakan yang direncanakan dan yang diimplementasikan. Selain itu, evaluasi juga dapat memberikan saran dan masukan terkait nilai-nilai yang mendasari kebijakan yang telah dibuat. Hal ini dapat membantu dalam merumuskan kembali masalah yang ada.

---

<sup>6</sup> Sahya Anggara, Kebijakan Publik , (2014:172-173)

### 3. Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari kata *to implement* dalam bahasa Inggris. Menurut Kamus Besar Webster (Wahab, 2006: 64), *to implement* mengimplementasikan berarti *to provide the means for carrying out* memberikan sarana untuk menjalankan sesuatu, dan *to give practical effect to* untuk menimbulkan dampak terhadap sesuatu.<sup>7</sup>

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2006: 65) menambahkan bahwa implementasi melibatkan tindakan-tindakan individu, pejabat, atau kelompok (pemerintah atau swasta) yang diarahkan pada untuk tercapainya tujuan kebijakan yang telah digariskan.<sup>8</sup>

Secara umum istilah implementasi dapat dikaitkan dengan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. kebijakan itu dirumuskan lalu dibuat dalam bentuk seperti undang-undang, peraturan dan akan diimplementasikan dengan tujuan akan mempunyai dampak dan tujuan yang ingin dicapai.

#### a. Model Van Meter dan Van Horn (1975)

Model Implementasi Kebijakan adalah suatu pendekatan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn. Model ini menggunakan berbagai variabel untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan yaitu:<sup>9</sup>

##### 1) Standar dan sasaran kebijakan

Keberhasilan pada implementasi kebijakan salah satunya dapat dinilai dengan sejauh mana tujuan kebijakan tercapai. Untuk mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan, penting untuk menetapkan standar dan tujuan yang harus dipatuhi oleh para pelaksana kebijakan. Jika para pelaksana tidak memahami dengan jelas tujuan dan standar kebijakan, maka implementasi kebijakan kemungkinan besar tidak akan berhasil.

##### 2) Sumber daya

Keberhasilan pada melakukan implementasi kebijakan juga bergantung pada kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang ada.

<sup>7</sup> Sahya Anggara, Kebijakan Publik , (2014:232)

<sup>8</sup> Sahya Anggara, Kebijakan Publik , (2014:232)

<sup>9</sup> Dr. HJ. Siti Marwiyah, M. SI, Kebijakan Publik,(2022) hlm. 40

Dukungan sumber daya ini baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia.

3) Karakteristik organisasi pelaksana

Kemampuan pelaksana yang didukung dengan dengan kompetensi yang dimiliki organisasi pelaksana, serta dukungan untuk mendukung implementasi kebijakan

4) Komunikasi antar organisasi

Komunikasi yang efektif, konsisten, dan koheren dari berbagai sumber sangat penting dalam membantu keberhasilan implementasi. Ketiadaan kejelasan, koherensi, dan konsistensi ini akan menghambat pencapaian tujuan. Komunikasi yang baik memastikan pelaksana memahami harapan dan tugas mereka. Namun, proses komunikasi di lembaga publik, khususnya pemerintah daerah, seringkali rumit dan rentan terhadap distorsi, baik disengaja maupun tidak. Interpretasi standar dan tujuan yang berbeda-beda dari berbagai sumber, atau bahkan dari sumber yang sama, akan mempersulit penegakan kebijakan. Implementasi kebijakan yang efektif bergantung pada komunikasi yang akurat dan konsisten. Koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat juga berperan penting dalam meminimalisir kesalahan dan meningkatkan efektivitas implementasi.

5) Disposisi atau sikap para pelaksana

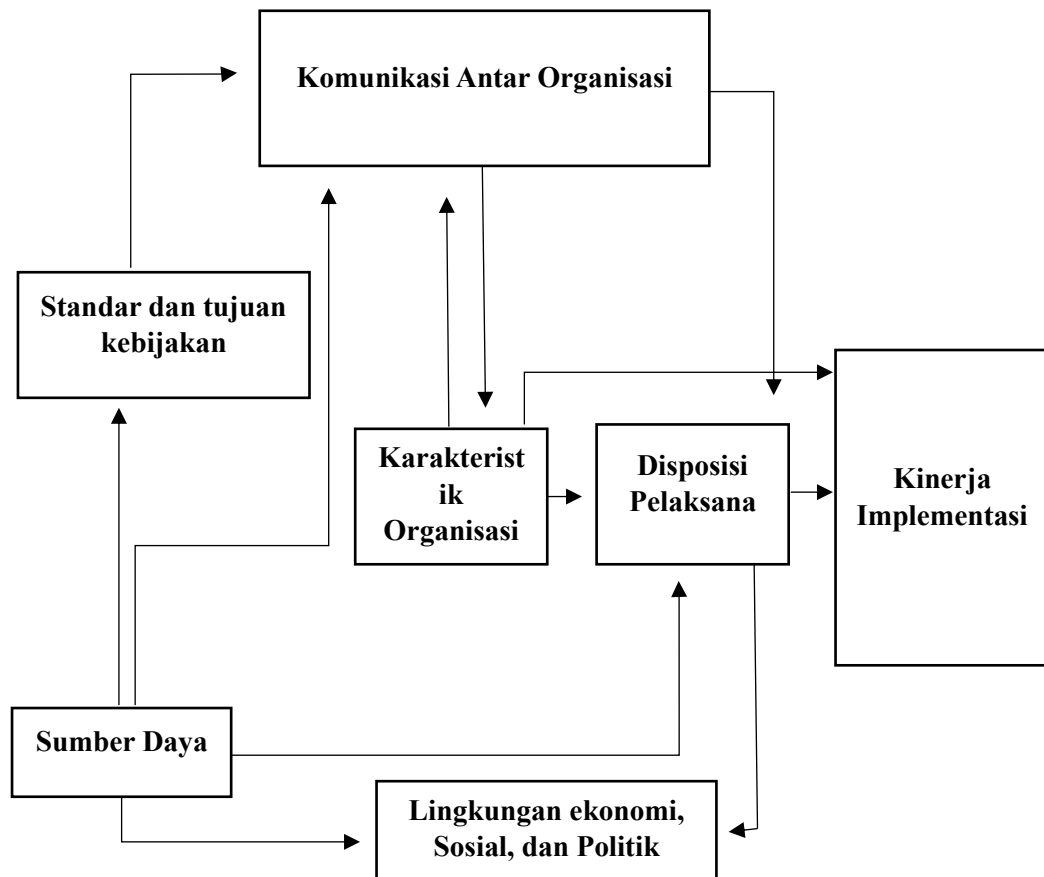
Pandangan seseorang terhadap kebijakan dapat mempengaruhi sikap mereka, dan penerimaan atau penolakan mereka dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, cara seseorang menilai dampak kebijakan terhadap kepentingan organisasi dan pribadi juga turut berperan penting. Proses implementasi kebijakan dimulai dengan mengevaluasi sejauh mana pengetahuan dan pemahaman para pelaksana terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan.

6) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan politik

Pertimbangan terakhir dalam mengukur keberhasilan dalam melakukan implementasi kebijakan yaitu ada pada pengaruh lingkungan

eksternal terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi faktor penghambat dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan, diperlukan lingkungan eksternal yang mendukung dan kondusif.

**Gambar 2. 1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter & Van Horn**



*Sumber : Van Meter dan Van Horn (1975,463)*

## **b. Model Edward III (1980)**

Model mengenai implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edwards III dengan konsep model implementasi kebijakan publik yang *Direct and Indirect Impact on Implementation* (Kurniati et al., 2015). Dalam pendekatan ini ada empat variabel yang menentukan keberhasilan dalam melakukan implementasi kebijakan, yaitu:<sup>10</sup>

### 1) Komunikasi

Dalam proses implementasi kebijakan, komunikasi memegang peran penting karena kebijakan yang efektif bergantung pada komunikasi yang baik. Aparat pelaksana membutuhkan informasi yang jelas dan konsisten mengenai tugas mereka. Komunikasi yang buruk menyebabkan inefisiensi dan penyimpangan dari tujuan kebijakan.

Keberhasilan implementasi juga bergantung pada pemahaman yang sama antara pelaksana dan kelompok sasaran mengenai tujuan dan sasaran kebijakan. Ketidakjelasan tujuan dapat memicu resistensi dari kelompok sasaran.

### 2) Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya, yang dimaksud sumber daya adalah aparatur birokrasi pelaksana. Kurangnya SDM yang kompeten akan mengakibatkan inefisiensi, bahkan jika komunikasi kebijakan sudah jelas. Sumber daya, baik manusia maupun finansial, merupakan faktor krusial. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan hanya akan menjadi dokumen belaka tanpa implementasi yang efektif.

### 3) Disposisi

Disposisi dapat diartikan sebagai sifat-sifat yang dimiliki oleh aparat pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis. Jika aparat pelaksana menunjukkan disposisi atau sikap yang positif dalam melaksanakan tugasnya, maka pelaksanaan kebijakan akan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Sebaliknya, jika aparat pelaksana memiliki

<sup>10</sup> Dr. Irawat Igrisa, S.PD., M.Si., *Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022), hlm. 61

pandangan atau sikap yang berbeda dari pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif.

#### 4) Struktur Birokrasi

Struktur dan organisasi birokrasi yang bertugas mengimplementasikan suatu kebijakan berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas menjadi panduan penting bagi pelaksana. Struktur organisasi yang terlalu berbelit-belit dapat menghambat pengawasan dan menimbulkan birokrasi yang rumit (red tape), sehingga menggagalkan pencapaian sasaran organisasi.

#### 4. Kelompok Pembudidaya Ikan

Kelompok pembudidaya ikan atau disingkat pokdakan merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan bergantung dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tujuan bersama antar anggota kelompok pembudidaya ikan air tawar.

Berdasarkan Permen KKP No 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan menjelaskan bahwa kelompok pembudidaya ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudi daya ikan yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok.

#### 5. Budidaya

Budidaya merupakan upaya yang telah terencana untuk melakukan memelihara dan mengembangbiakan tanaman atau hewan dengan tujuan untuk tetap selalu terjaga sehingga mendapatkan hasil yang bermanfaat (Cahyana, 2024). Budidaya sebuah cara untuk menghasilkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang melakukannya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia,

budidaya merupakan suatu usaha yang memberikan manfaat dan hasil yang berguna.

Budidaya hewan, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2013, merujuk pada kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan di lokasi tertentu dalam lingkup kawasan budidaya untuk hewan peliharaan dan produk hewan. Sementara itu, pembudidayaan ikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 tentang perikanan adalah kegiatan yang mencakup pemeliharaan, pembesaran, pembiakan ikan, serta pemanenan dalam lingkungan yang terkontrol.

#### **a. Tujuan Budidaya**

Tujuan budidaya ikan yaitu untuk mendapatkan produksi perikanan yang lebih banyak dibandingkan dengan hasil ikan yang hidup di alam liar (Soeprapto, 2022). Untuk mencapai tujuan tersebut perlunya memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi usaha budidaya, antara lain benih, pembuatan media pemeliharaan, pakan serta obat. Sehingga dapat terlaksana budidaya dengan baik, perlu diperhatikan beberapa ketentuan berikut:

- 1) Pemeliharaan tempat berdasarkan kuantitas air serta temperatur air.
- 2) Perencanaan Perencanaan dalam melakukan budidaya ikan meliputi ukuran unit usaha.
- 3) Perencanaan media budidaya didasarkan pada kebutuhan dari bentuk kolam, kedalaman kolam hingga bahan baku kolam yang sesuai dengan kebutuhan budidaya.
- 4) Perencanaan Perencanaan metode dalam melakukan budidaya ikan hal ini dikarenakan pada pertimbangan ekonomis, cara pengelolaan, dan biologis.

#### **b. Tahapan Pelaksanaan Budidaya**

Menurut Nagoro (2022), tahap-tahapan yang ada pada kegiatan budidaya ikan meliputi beberapa tahap:

- 1) Persiapan media

Setiap kali periode produksi akan dimulai, media harus disiapkan yang meliputi pembersihan, sterilisasi, dan pengisian air sebagai media budidaya.

## 2) Penyediaan induk/penebaran benih

Pada pembenihan, kegiatan yang dilakukan yaitu memilah indukan yang siap dipijah. Penempatan indukan secara berpasangan dalam satu media, saat pemijahan selesai dilakukan pemindahan telur, penetasan, dan pemeliharaan hingga menjadi benih. Penebaran benih dilakukan saat media budidaya siap, sebelum ditebar benih harus diaklimatisasi terlebih dahulu agar beradaptasi dengan suhu lingkungan.

## 3) Pengelolaan air

Indikator kualitas air sangat berpengaruh terhadap ikan antara lain, suhu air, kadar garam, kadar oksigen. Indikator-indikator yang ada pada air ini yang dapat menentukan pertumbuhan pada ikan.

## 4) Pengelolaan pakan

Pengelolaan pakan sangat penting ketika benih ikan memerlukan pakan berkualitas tinggi dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Pemberian pakan sebaiknya dilakukan secara bertahap untuk mencegah pemborosan pakan. Sisa pakan yang tidak terpakai dapat menyebabkan pencemaran pada media budidaya.

## 5) Pengendalian penyakit

Penyakit merujuk pada segala hal yang dapat mengganggu pertumbuhan ikan, seperti penyakit kulit, gangguan pada insang, dan masalah pada organ dalam. Pengendalian dapat dimulai dari persiapan lahan atau media budidaya, pengelolaan kualitas air, serta pemberian pakan, termasuk penanganan saat terjadi penularan penyakit secara tiba-tiba. Lebih baik melakukan pencegahan daripada harus mengobati setelah penyakit menyerang.

## 6. Perikanan

Aktivitas perikanan melibatkan manusia terkait dengan melakukan pemanfaatan sumber daya hayati di perairan. Sumber daya hayati perairan meliputi ikan, amfibi, dan lainnya yang tinggal di perairan dan sekitarnya (Irwansyah, 2019). Di Indonesia, Undang-Undang No. 31/2004 mengatur kegiatan perikanan mulai dari tahap pra produksi hingga pemasaran, yang dijalankan dalam kerangka bisnis perikanan. Oleh karena itu, perikanan dapat

dianggap sebagai bagian dari agribisnis karena melibatkan pemanfaatan sumber daya alam dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia serta menjaga produktivitas sumber daya perikanan dan kelestarian lingkungan.

Perikanan mencakup kegiatan budidaya ikan dan manajemen sumber daya perikanan hingga tahap penjualan. Sumber daya perikanan merujuk pada semua organisme hidup di perairan termasuk Terdapat berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di dalam lingkungan perairan, baik itu di sungai maupun di laut. Oleh karena itu, perikanan dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu perikanan darat dan perikanan laut, seperti yang dijelaskan (Ismail, 2023). Perikanan darat merujuk pada segala kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah perairan darat, bukan di laut terbuka.

Perikanan di darat meliputi berbagai usaha di luar laut, seperti penangkapan ikan di air tawar (sungai, danau, rawa), budidaya di tambak, kolam, dan keramba, serta kegiatan perikanan lainnya di lingkungan daratan. Sebaliknya, perikanan laut dikategorikan menjadi dua: pelagis (ikan permukaan, contohnya cakalang, tuna, layang, kembung) dan demersal (ikan dasar, contohnya udang, kepiting, kakap merah). Baik perikanan darat maupun laut sangat penting untuk perekonomian dan ketahanan pangan, sehingga pengelolaan berkelanjutan yang memperhatikan aspek ekologi dan konservasi sangat krusial untuk keberlanjutan sumber daya perikanan (Tri Aprilianto, 2021).

## **7. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat**

Menurut Binarto (1997:88) Meningkatkan berarti usaha untuk mencapai perubahan, kemajuan, dan perbaikan. Sedangkan perekonomian berasal dari kata dasar "Oikos" yang memiliki arti rumah tangga dan "Nomos" yang berarti peraturan, yang menggambarkan aturan yang mengatur bagaimana pemenuhan kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Perekonomian melibatkan kegiatan manusia dalam tahap produksi, distribusi, hingga konsumsi barang serta jasa. Sebagai ilmu, perekonomian menjelaskan cara

menghasilkan dan menggunakan barang serta jasa dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan materi masyarakat.

Adapun menurut Edgar F. Huse dan James L. Bowditch dalam Maskuroh (2019), mereka berpendapat bahwa perekonomian didefinisikan sebagai sistem atau serangkaian yang saling berkaitan dan saling bergantung pada satu sama lain, menciptakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Sedangkan perekonomian masyarakat merupakan suatu sistem perekonomian yang berasal pada kekuatan perekonomian masyarakat, yang dilakukan dengan mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat menjadi sebuah penghasilan, dalam sektor pertanian, Perkebunan, peternakan, dan sebagainya.

Proses meningkatkan ekonomi Masyarakat dengan berbagai Upaya seperti pertumbuhan produksi, pendapatan dan terbukanya lapangan pekerjaan. Hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan infrastruktur, mengembangkan keterampilan dan Pendidikan, serta mendukung regulasi pemerintah yang mendorong untuk pertumbuhan ekonomi (Zulfa, 2021).

Tujuan meningkatkan perekonomian Masyarakat adalah agar meningkatkan kesejahteraan untuk seluruh anggota Masyarakat. ekonomi yang kuat akan berdampak pada berbagai sektor seperti pertumbuhan lapangan kerja, Kesehatan, Pendidikan, dan banyak bidang lainnya. meningkatnya daya beli Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta meningkatkan kualitas hidup (Alfiani, 2021). Untuk mencapai tujuan ini, Beberapa Upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan lapangan kerja untuk Masyarakat dengan ini akan memiliki sumber pendapatan yang stabil, meningkatkan kualitas Pendidikan untuk membantu Masyarakat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga lebih mampu bersaing dan menghasilkan pendapatan yang lebih baik (Humaidi, 2021).